



AL-QUR'AN DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA: PEREBUTAN MAKNA ATAS LAFAZ *AULIYA'* DAN *ULAMA'*

Mokhamad Choirul Hudha

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: hudha.mchoyrul@gmail.com

Abstract

Politics is a phenomenon that is closely related to the human condition that always lives in a society and a state. Political events that occur in Indonesia often involve the role of religion in the process. Many political actors use religious verses to convince Muslims in particular to choose him and his group. This caused a reaction from political actors who became competitors to turn the strategy back to convince voters by giving a different interpretation, so that in the end there was a struggle for meaning in it. This article specifically discusses the polemic of the debate over the meaning of the Auliya and ulama' pronunciation, which takes place close to the election in Indonesia. The question that is being answered in this paper is to what extent is the debate going? and what is the influence on the political dynamics in Indonesia? In this article, the author compiles a variety of statements and advocates of characters circulating on online news sites. The results of the study showed that the polemic of interpretation in circulation was enough to give a new color to the development of the interpretation of the Qur'an and political dynamics, especially in Indonesia.

Keywords: *Auliya, Ulama', Tafseer, Politics*

Abstrak

Politik merupakan suatu fenomena yang terkait erat dengan kondisi manusia yang selalu hidup bermasyarakat dan bernegara. Perhelatan politik yang terjadi di Indonesia, sering kali melibatkan peran agama dalam prosesnya. Para pelaku politik pun tak jarang menggunakan ayat-ayat agama untuk meyakinkan pemilihnya, khususnya umat Islam agar memilih ia dan juga kelompoknya. Hal tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari lawan politik yang menjadi kompetitor untuk turut memutar strategi dalam meyakinkan kembali pemilih dengan memberikan penafsiran berbeda, hingga pada akhirnya terjadi perebutan simbol makna di dalamnya. Artikel ini secara spesifik membahas tentang polemik perdebatan makna atas lafaz Auliya' dan Ulama', yang terjadi berdekatan dengan pesta demokrasi di Indonesia. Pertanyaan yang coba dijawab dalam tulisan ini adalah, sejauh mana perdebatan yang terjadi? dan apa pengaruh terhadap dinamika politik yang ada di

Indonesia? Dalam artikel ini, penulis menghimpun berbagai macam pernyataan maupun pembelaan tokoh yang beredar di situs berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik penafsiran yang beredar cukup memberikan warna baru bagi perkembangan tafsir al-Qur'an dan dinamika politik khususnya di Indonesia.

Kata kunci: *Auliya', Ulama', Tafsir, Politik*

A. PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang terkait erat dengan kondisi manusia yang selalu hidup bermasyarakat.¹⁴ Hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.¹⁵ Perhelatan politik yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan peran agama dalam prosesnya. Pelaku politikpun banyak yang menggunakan ayat-ayat agama (baca; al-Qur'an) untuk meyakinkan para pemilihnya, khususnya umat Islam-sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, agar mendukung dan memilihnya.¹⁶

Sejauh ini, kajian yang menyinggung tentang sejarah serta dinamika sosial-politik dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an telah banyak dilakukan seperti misalnya oleh A.H.John dalam karyanya berjudul, "The Qur'an in the Malay World: Reflection on 'Abd al-Ra'uf of Singkel (1615-1693)".¹⁷ Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Peter G. Riddell dan Howard M.Federspiel. Baik Riddell maupun Federspiel melakukan kajian dengan mengacu pada keterpengaruhannya serta dinamika keilmuan Islam di Timur Tengah dalam tafsir Al-Qur'an di Indonesia.¹⁸ Selanjutnya, lebih spesifik membahas tentang adanya motif politik dalam penafsiran al-Qur'an diungkapkan oleh Islah Gusmian. Dalam disertasi berjudul dialektika tafsir al-Qur'an dan praktek politik rezim orde baru,¹⁹ Islah menyatakan bahwa telah terjadi dialektika antara mufassir dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian mufassir mendukung (pro) namun sebagian lainnya menentang (kontra) meskipun sistem pemerintahan yang berlangsung saat itu dikenal otoriter.

Berdasar beberapa kajian diatas, kajian yang coba diangkat oleh peneliti bisa dianggap baru. Kajian ini akan terfokus pada masa rezim reformasi, utamanya dibawah kepemimpinan periode pertama presiden Joko Widodo. Dalam rentang masa itu, terdapat beberapa fenomena yang bersinggungan dengan pemaknaan al-Qur'an hingga

¹⁴ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik; Suatu Telaah dari Sistem Politik", dalam Jurnal Mimbar, Vol. 21, No. 2, 2005, hlm. 262

¹⁵ *Ibid.*, hlm 265

¹⁶ Helmy Zakaria, "Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surat al-Ma'idah Ayat 51" dalam Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 167

¹⁷ Anthony H.John, "The Qur'an in the Malay World: Reflection on 'Abd al-Ra'uf of Singkel (1615-1693)" dalam Journal of Islamic Studies, 1998

¹⁸ Lihat Peter G. Riddell, *Islam and The Malay-Indonesian World: Transmission and Responses*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, bab IX dan XII; dia juga tulis dalam artikel khusus, "Earliest Qur'anic Exegetical Activity in Malay-Speaking State", *Archipel*, 38 (1989), hlm. 107-124 dan Howard M. Federspiel, "An Introduction to Qur'anic Commentaries in Contemporary Southeast Asia", dalam *The Muslim World*, Vol. LXXXI, No. 2, 1991, hlm. 149-161.

¹⁹ Islah Gusmian, "Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru", Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

menimbulkan konflik dan polemik, diantaranya, *pertama*, pemaknaan lafaz *auliya'*, oleh Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta kala itu yang berniat mencalonkan lagi. *Kedua*, penyematan gelar ulama' kepada Calon Wakil Presiden RI 2019, Sandiaga Shalahudin Uno. Kedua peristiwa ini menjadi menarik dan memanas karena berdekatan dengan akan diadakannya pesta politik (baca; pilkada, pilpres).

Penelitian ini bersumber pada tulisan-tulisan yang beredar pada situs berita online tentang polemik perebutan makna lafaz *auliya'* dan *ulama'* sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekundernya adalah tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, baik dari media internet maupun tulisan-tulisan yang ada dalam media cetak seperti buku, jurnal, dan artikel- artikel yang berkaitan.

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, peneliti mengumpulkan tulisan tentang penafsiran lafaz *auliya*, *hizb* dan *ulama'* menurut para mufassir dan tokoh yang ahli dalam bidangnya. *Kedua*, peneliti mengumpulkan tulisan tentang polemik pemaknaan lafaz *auliya'* dan *ulama'* yang ada pada situs internet. *Ketiga*, peneliti mengumpulkan tulisan berkenaan dengan profil para tokoh yang terlibat dalam polemik untuk mengetahui sejauh mana tingkat kredibilitas dan otoritasnya dalam menafsirkan. *Keempat*, peneliti menganalisis polemik perdebatan yang terjadi dengan menggunakan teori interaksionisme simbol atau perebutan makna. *Kelima*, peneliti memaparkan keterkaitan polemik yang terjadi dengan dinamika politik di Indonesia.

1. Teori Interaksionisme Simbol

Salah satu disiplin ilmu yang dianggap kaya akan 'perspektif' adalah sosiologi. Sejak kelahirannya sekitar abad ke-19, disiplin ilmu ini tampil sebagai ilmu multi-paradigma. George Ritzer, menyebutnya sebagai disiplin ilmu pengetahuan berparadigma ganda.²⁰ Sosiologi memiliki tiga paradigma dengan varian-varian teori. *Pertama*, paradigma fakta sosial dipelopori oleh Emile Durkheim. Paradigma ini memiliki empat teori, yakni: teori fungsionalisme strukturalis, teori sistem, teori konflik dan teori sosiologi makro. *Kedua*, paradigma definisi sosial, yang dipelopori oleh Max Weber. Paradigma ini memiliki tiga teori, yakni teori aksi (*theory of action*), teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. *Ketiga*, paradigma perilaku sosial memiliki dua teori, yakni teori *behavioral sociology* dan teori *exchange*.

Dalam tulisan ini, teori yang digunakan lebih lanjut adalah teori interaksionisme simbol, karena berkait berkelindan dengan perebutan simbol makna sesuai tema kajian. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial. Jika dilacak geneologinya, teori ini dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pragmatisme, yang dicetuskan pertama kali oleh George Herbert Mead dari Chicago.²¹ Pada awalnya, teori interaksionisme simbolik memberikan fokus studinya pada perilaku manusia yang bersifat interpersonal. Para ilmuwan menyebut, interaksionisme simbolik beraliran sosiologi mikro. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori ini juga meneliti perilaku masyarakat secara keseluruhan. Maka kemudian, teori interaksionisme simbolik sering disebut sebagai mikro-sosiologik sekaligus makro-sosiologik.

Berdasarkan pemaparan di atas, perspektif simbolik menjelaskan sebuah tindakan sosial dengan memahami makna dari tindakan tersebut. Perspektif ini meyakini bahwa

²⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9

²¹ Umiarso & Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Klasik Hingga Modern* (Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2014),79. Kedua penulis ini menyebutkan konsep pragmatism dalam filsafat pertama kali diperkenalkan oleh Charles Sandre Peirce (1839-1914), tetapi kemudian termasyur oleh empat tokoh, yaitu Peirce sendiri, William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), dan Richard Rorty (1931-2007).

tindakan manusia penuh akan ‘makna’. Tindakan memiliki fungsi setelah ditafsirkan maknanya oleh orang atau sekelompok orang yang melakukan interaksi di dalamnya. Secara singkat, George Ritzer & Douglas J. Goodman menjelaskan pandangan George Harbert Mead tentang tahap-tahap tindakan manusia, sebagaimana berikut:

Pertama, Tahap impuls, yaitu reaksi manusia terhadap stimuli (rangsangan). Contoh, rasa lapar akan semakin meningkat saat manusia melihat makanan. Jadi, makanan yang tersedia itu merupakan stimuli yang membangkitkan impuls.

Kedua, Tahap persepsi, yaitu reaksi manusia terhadap rangsangan yang digerakkan oleh impuls. Ketika manusia sedang dalam kondisi lapar, dan tiba-tiba melihat makanan, maka manusia akan memberikan reaksi. Reaksi manusia tersebut bisa bermacam-macam, misalnya langsung mengambil makanan tersebut, atau berusaha menahan lapar sambil menunggu orang yang dihormatinya mengambil makanan terlebih dahulu. Menurut Mead, dalam memberikan reaksi, manusia dikonstruksi oleh banyak sumber, seperti agama, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain.

Ketiga, Tahap manipulasi, yaitu manusia mengambil tindakan berkaitan dengan objek. Tetapi tindakan yang dipilih manusia tidak spontan, karena pada tahap ini merupakan masa jeda yang membentuk pikiran manusia untuk mengambil tindakan. Lebih lanjut, Mead mengatakan, pengalaman masa lalu mempengaruhi pemahaman manusia dalam masa jeda itu.

Keempat, Tahap konsumsi, yaitu tahap pelaksanaan, dimana manusia mengambil suatu tindakan. Mead menjelaskan bahwa pada tahap ini manusia mengambil tindakan karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan hasratnya. Pada saat mengambil tindakan tersebut, manusia telah menghitung implikasinya terlebih dahulu.²²

2. Sekilas Lafaz *Auliya'* dan *Ulama'* dalam Al-Qur'an

Sebelum masuk ke pembahasan, peneliti ingin mencantumkan terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan lafaz-lafaz yang menjadi polemik dalam penelitian ini. Adapun tidak semua ayat yang mengandung lafaz *auliya'* dan *ulama'* akan ditampilkan, melainkan hanya ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam polemik penafsiran.

a. Lafaz *Auliya'*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya' (mu); sebahagian mereka adalah auliya' bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya', Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Qs. al-Maidah; 51)"*²³

Merujuk pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, terdapat 229 kata yang berasal dari huruf *waw*, *lam*, *yā* (*waliy*) bentuk tunggal dari kata *auliya'*). Sedangkan untuk kata *Auliya'* disebutkan sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an.²⁴

²² George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory; Six Edition*, terj., (Jakarta, Prenada Media, 2004), 274-276..

²³ Qur'an in Word, aplikasi

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Darul Hadis, t. t), hlm. 764-768.

b. Lafaz Ulama'

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Qs. Fathir: 28)²⁵

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya: dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya? (Qs. Asy-Syuara: 197)²⁶

Konsep ulama' berkait erat dengan konsep ilmu. Orang yang memiliki ilmu disebut 'alim. Lafaz *ulama'* merupakan bentuk jamak dari kata 'alim. Artinya, *ulama'* merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kata ilmu ('ilm) menurut M Dawan Rahardjo²⁷ diulang berkali-kali dalam al-Qur'an, bahkan melebihi jumlah pengulangan kata *al-din* (agama). Jika kata *al-din* diulang sebanyak 103 kali, maka akan ditemukan dalam al-Qur'an bahwa kata *al-'ilm* diulang sebanyak 105 kali.²⁸

3. Menimbang Otoritas Tokoh: Awal Polemik

Berbagai polemik perdebatan yang muncul terkait dengan penggunaan lafaz al-Qur'an di ranah politik, dimulai dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh yang kemudian muncul berbagai argument dari tokoh lain yang mendukung maupun menolak. Tokoh yang dianggap memulai polemik diantaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Hidayat Nur Wahid. Sebelum melangkah lebih jauh, tulisan ini berusaha mengungkap kedua sosok ini secara singkat agar terjadi pemahamanyang lebih komprehensif terkait tema pembahasan.

Lafaz *auliya'* menjadi ramai diperbincangkan, bermula dari surat al-Maidah ayat 51 yang disinggung oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berpidato dalam acara kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, Ahok menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar jangan mau "dibohongi" pakai al-Maidah ayat 51. Menurut Ahok, ayat itu selalu dijadikan senjata politik agar umat Islam tidak memilih calon dari kalangan non-Islam. Perkataan tersebut kemudian menjadi perdebatan panjang, karena banyak dari umat Islam menilai bahwa isi dari al-Maidah ayat 51, memang mengajarkan larangan memilih maupun menjadikan 'auliya' –yang diartikan sebagai pemimpin- beragama selain Islam (baca: Nasrani).²⁹ Alih-alih mendapat pujian dan dukungan, perkataan Ahok tersebut dinilai telah menyakiti hati umat Islam dan

²⁵ Qur'an in Word, Aplikasi

²⁶ Qur'an in Word. Aplikasi

²⁷ M Dawan Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ <https://tirto.id/saksi-ahli-agama-kata-awliya-di-al-maidah-51-multi-tafsir-eleP> diakses pada tanggal 16 Januari 2019

menganggap seolah para tokoh agama Islam adalah pembohong.

Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok mempunyai nama Tionghoa: *Zhōng Wànxué*, adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 09 Mei 2017, dan hendak mencalonkan kembali di pilkada 2017.³⁰ Ia merupakan putra pertama dari Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjauw). Ia lahir dari keluarga keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia) di Belitung Timur, bangsa Belitung pada tanggal 29 Juni 1966.³¹

Ahok menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kabupaten Belitung timur. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas trisakti Jakarta dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990. Basuki pun sempat menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen prasetiya Mulya.³² Karir politik-nya pun dianggap cukup melejit dan *moncer*. Berbagai jabatan strategis telah berhasil ia duduki, di antaranya ia pernah menjadi bupati Belitung timur, anggota DPR-RI, Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta.³³

Membaca sekilas profil Basuki Tjahaja Purnama, maka dapat diketahui dari sinilah polemik itu muncul. Banyak kalangan menilai bahwa Ahok telah “lompat pagar”. Ia menyinggung isi kandungan kitab suci umat agama lain dengan menggunakan bahasa ‘berbau politik’. Latar belakang keluarga dan pendidikan pun tidak ada yang mengarah kepada studi agama ataupun tentang penafsiran makna dari sebuah kitab suci. Maka, secara kapasitas keilmuan, ia dianggap tidak punya kredibilitas dan otoritas menyampaikan hal demikian. Ia kemudian didemo dengan aksi bela Islam berjilid-jilid yang mengantarkan ia menjadi seorang narapidana.

Tokoh selanjutnya yang menuai polemik melalui ucapannya adalah Hidayat Nur Wahid. Polemik muncul ketika ia menyebut Sandiaga Shalahudin Uno sebagai ulama’. Menurut Hidayat, julukan itu berangkat dari terminologi bahasa Arab yang mendefinisikan ulama’ sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan pun disertai akhlaq yang luhur.³⁴ Hidayat menyebut, julukan ulama’ selama ini salah kaprah bila hanya dikaitkan dengan pemuka agama. Menurut dia, sesuai dengan kamus bahasa Arab, ulama’ juga bisa digunakan untuk menyebut orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misal Ahli mesin, listrik, ekonomi, industri, dan seterusnya.

Berpijak dari penjelasan itu, maka Hidayat pun mantab menyematkan *embel-embel* ulama’ kepada Sandiaga Uno. Menurut Hidayat, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjadi calon wakil presiden itu memiliki banyak keahlian. Sandiaga diakui ahli di bidang ekonomi, relasi dan bisnis. Selain itu, ia juga memiliki akhlaq yang luhur, karena dikenal sebagai seorang yang tidak setengah-setengah dalam menjalankan perintah agama, bahkan puasa sunnah telah menjadi gaya hidupnya, Maka dari itu, menurut Hidayat, Sandiaga layak disebut ulama’ karena telah memenuhi dua syarat sebagai ulama’.³⁵ Sebagaimana pemahaman Hidayat terkait lafaz ulama’.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Thahaja_Purnama diakses pada tanggal 16 Januari 2019

³¹ Lihat di Ahok.org

³² Dikutip dari "Basuki Thahaja Purnama". *www.jakarta.go.id*. Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 27 Februari 2019

³³ *Ibid.*,

³⁴ Berdasarkan wawancara Hidayat Nur Wahid oleh Tempo saat ditemui di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

³⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1127615/sebut-sandiaga-ulama-hidayat-nur-wahid-beberkan-alasannya/full&view=ok> diakses pada 16 Januari 2019 jam 11.00 WIB

Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. adalah seorang dosen, politikus dan legislator Indonesia. HNW (biasa ia dipanggil) lahir di kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960. Ia lahir dari lingkungan keluarga Muslim taat di Jawa Tengah, ia belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Sebelum menempuh studi sarjana hingga doktor di Universitas Islam Madinah. Karier politiknya dimulai setelah ikut mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998. Kemudian, ia menjadi ketua partai tersebut sejak bulan Mei 2000, dan ikut berperan dalam mentransformasikan PK menjadi PKS pada bulan Juli 2003.³⁶

Setelah merampungkan studinya di tanah Arab, Hidayat pulang ke Indonesia dan mulai terlibat aktif dalam Gerakan Tarbiyah serta turut mendirikan Yayasan Alumni Timur Tengah dan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) di bawah Yayasan al-Haramain. Iajuga menjabat sebagai redaktur jurnal *Ma'rifat* yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, untuk mengimbangi peredaran jurnal-jurnal yang menyuarakan pembaharuan Islam pimpinan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Selain itu, ia juga berprofesi sebagai dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas asy-Syafi'iyah.³⁷

Hidayat terlibat aktif di berbagai forum dakwah, seperti Forum Dakwah Islam dan Forum Indonesia Damai, sebagai ketua koordinator tim agama, yang digagas oleh beberapa tokoh lintas agama seperti Nur Kholis Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Franz magniz Suseno, dan Asmara Nababan. Selain itu, selama aktif menjabat sebagai ketua MPR, ia juga pernah menjadi narasumber tetap dalam acara-acara keagamaan di salah satu stasiun televisi swasta nasional.³⁸

Melihat latar belakang pendidikan, keilmuan serta aktifitas Hidayat Nur Wahid, maka sosok Hidayat dianggap otoritatif ketika menafsirkan lafadz ulama' yang terdapat dalam al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan kasus yang menjerat Ahok. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa pernyataan Hidayat Nur Wahid menjadi sebuah polemik dan menimbulkan perdebatan?

Jika dianalisis lebih lanjut, maka setidaknya akan ditemukan beberapa alasan, *Pertama*, hal itu dikarenakan Hidayat lebih *jamak* dikenal sebagai seorang politisi dibanding sebagai ahli agama. Alih-alih dianggap sebagai fatwa, ucapannya dianggap sebagai bujukan seorang politisi yang sedang menjajakan dagangannya, mengingat partainya (baca: PKS) menjadi pengusung Sandiaga Shalahudin Uno. *Kedua*, di Indonesia makna ulama' cenderung tereduksi menjadi kiai. Mengutip penjelasan Samsul Arifin,³⁹ meskipun kedua kata tersebut memiliki kemiripan makna, namun di sisi lain terdapat perbedaan fundamental, yakni ulama' merupakan kategorisasi berdasarkan al-Qur'an (teologi), sementara kiai adalah kategorisasi yang berdasarkan budaya. Dari segi makna-pun, ulama' memiliki lingkup yang lebih luas dibanding kiai. Orang yang disebut alim atau ulama' adalah mereka yang memiliki otoritas, yang semestinya tidak hanya berkisar pada bidang ilmu-ilmu ke-Islam-an, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Ketiga, penafsiran yang diangkat oleh Hidayat berkaitan dengan lafaz ulama',

³⁶ Profil Muhammad Hidayat Nur Wahid di merdeka.com

³⁷ Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Samsul Arifin, "Ulama Dalam Pusaran Politik Kekuasaan" dalam <https://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 12 Desember 2019

dinilai sebagai sebuah strategi politik untuk mengimbangi pasangan kompetitor yang menggandeng kyai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, mengingat kyai Ma'ruf telah lekat dengan *image* ulama', bahkan otoritas yang dimiliki berlapis-lapis karena selain dikenal sebagai putra kyai pemimpin sebuah pondok pesantren, ia juga dikenal sebagai pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama' dan Majelis Ulama' Indonesia. Hal ini-lah yang membuat kemudian perlu dilemparkan wacana *reinterpretasi* lafaz ulama' agar pemilih mayoritas (baca: umat Islam) tidak lari.

4. Konsep Auliya' dan Ulama' dalam Perdebatan

a. Auliya': Bolehkah Pemimpin Non-Muslim?

Perdebatan seputar makna lafaz auliya' telah membelah masyarakat ke dalam dua kubu besar. Kubu pertama, yakni mereka yang cenderung Pro terhadap Ahok, maksudnya menganggap bahwa arti auliya' dalam ayat 51 al-Maidah bukanlah berarti pemimpin. Kubu ini cenderung memahami bahwa yang disebut auliya' dalam ayat tersebut adalah teman setia. Kemudian kubu yang kedua adalah mereka yang kontra terhadap Ahok, maksudnya mereka yang berpemahaman bahwa ayat tersebut lekat dengan konsep kepemimpinan. Jadi, yang dilarang dalam ayat tersebut bukan sekedar ber'teman-setia' melainkan menjadikan mereka seorang pemimpin pun juga dilarang.

Diantara pendapat yang mewakili kubu pertama, datang dari Ahmad Ishomudin, Rois Syuriah PBNU. Ia berpendapat bahwa kata "auliya" yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an, tepatnya surat al-Maidah ayat 51 merupakan kata yang memiliki makna ganda atau multi tafsir. Menurut pembacaan Ishomudin, kata *auliya'* merupakan kata *musytarak* yakni kata yang mempunyai makna lebih dari satu istilah. Hal ini berdasarkan 30 (tiga puluh) kitab tafsir al-Qur'an dan Hadits yang telah dikaji, ia mengaku tidak menemukan satu pun kata *auliya'* yang diartikan sebagai pemimpin. Kata auliya' pada ayat tersebut lebih tepat jika diartikan teman setia.⁴⁰

Ishomudin menjelaskan bahwa dirinya tidak keberatan, apabila terdapat beberapa pihak yang mengartikan *auliya'* sebagai pemimpin. Namun Ia menggaris-bawahi bahwa yang berhak berlaku demikian adalah mereka ahli fiqih yang menguasai tafsir al-Qur'an dan Hadits. Menurut Ishomudin, orang-orang tersebut berhak menerjemahkan lafaz *auliya'* sesuai dengan makna yang menurut mereka lebih relevan dan meninggalkan makna yang lainnya.⁴¹

Ishomudin cenderung pro terhadap Ahok yang menyatakan bahwa lafaz *auliya'* bukan ditafsirkan sebagai pemimpin. Ia cenderung tidak mempermasalahkan menunjuk non-muslim untuk menjadi pemimpin di kalangan umat Islam. Di lain pihak yang cenderung kontra, Syamsudin Arif menulis dalam sebuah artikel tentang konsep seorang pemimpin yang mensyaratkan untuk mendahulukan keimanan dibanding syarat-syarat lain.⁴²

Membincang kepemimpinan politik, maka tradisi intelektual Islam akan senantiasa menyoalkan tiga hal. Menurut Arif, tiga persoalan tersebut ialah, Pertama, pemimpin yang kurang layak (*imamatul mafdul*). Kedua, pemimpin non-muslim (*imamatul kafir*). Ketiga, pemimpin yang suka maksiat (*imamatul fasiq*). Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa persoalan ini muncul karena banyak kasus yang menjadi

⁴⁰ Lihat dalam *qureta.com; tirta.id; nahimunkar.org* terkait pembelaan Ishomudin terhadap Ahok dan penafsiran terkait surat al-Maidah ayat 51, diakses pada tanggal 04 November 2019

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Syamsudin Arif, "Non-Muslim di Pentas Politik" dalam Koran Republika (kamis, 17/03/2016); juga diposting dalam *nahimunkar.org* diakses pada tanggal 10 November 2019

khalifah, amir ataupun sultan sepanjang sejarah Islam itu kurang layak (*mafduh*) serta banyak yang kurang taat (*fasiq*) daripada yang saleh. Terkecuali para khalifah yang mendapat petunjuk seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa orang yang mengikuti keteladanan mereka, semisal Umar bin Abdul 'Aziz.⁴³

Secara historisitas, maka bisa dibaca telah terjadi adanya kesenjangan antara 'apa yang semestinya' (*das Sollen*) dan 'apa nyatanya' (*das Sein*). Syamsudin Arif menjelaskan, Idealnya seorang pemimpin itu adalah mereka yang bertakwa, berilmu, pemberani, kompeten dan seterusnya. Namun, realitasnya pada zaman Bani Umayyah, Bani 'Abbasiyyah dan sesudahnya lebih banyak yang dilantik adalah mereka yang mempunyai kekurangan dan kelemahan. Maka, sebagian ahli agama membolehkan orang yang kurang kompeten menjadi pemimpin. Dalam kasus ini disebut *imamatul-mafdul*.⁴⁴

Dalam tulisannya, Syamsudin Arif mengungkapkan bahwa *imamatul-fasiq* yaitu kasus di mana seseorang yang masih suka melanggar hukum-hukum agama –entah karena sistem keturunan ataupun kudeta militer– naik menjadi penguasa, maka sebagian ulama' mengakui legitimasinya dan menganjurkan umat Islam untuk taat kepadanya selama ia masih Islam, melaksanakan tugas-tugasnya, dan tidak menyuruh melawan perintah Allah dan sunah Rasul-Nya. Hal ini dibenarkan untuk menghindari bencana yang lebih besar seperti terjadinya konflik horizontal dan pertumpahan darah.⁴⁵

Menurut Syamsudin Arif, terkait permasalahan pemimpin non-muslim jarang sekali bahkan hampir tidak pernah dibicarakan. Ia berargumen bahwa secara normatif maupun historis hal itu tidak boleh dan tidak pernah terjadi. Lebih jauh ia menyampaikan pendapat dari para pemuka Madzhab Syafi'i, seperti Imam an-Nawawi, juga dalam kitab *al-Iqna' fi halli al-fazl 'Abi Syuja'* karya al-Khatib as-Syarbini, mengungkapkan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin itu mesti akil baligh, orang Islam (bukan kafir), adil, merdeka, laki-laki, berilmu, mampu berjihad, pemberani, mempunyai visi dan kompetensi, serta sehat penglihatan dan pendengaran.⁴⁶

Syamsudin Arif mengutip pendapat Fakhruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Menurutnya, menjalin aliansi dengan non-muslim (*muwalat al-kafir*) mengandung tiga pengertian. Yakni, Pertama, meridhai kekufuran mereka. Hal Ini jelas dilarang, karena merestui kekufuran itu kufur (*ar-ridha bil kufri kufrun*). Kedua, bergaul dengan mereka secara baik (*al-mu'asyarah al-jamilah*) di dunia. Terkait hal Ini diperbolehkan. Dan ketiga, berpihak atau condong kepada mereka (*arrukun ilayhim*), mengulurkan bantuan (*alma'unah*), mendukung mereka (*al-muzaharah*), dan membela kepentingan mereka (*an-nusrah*). Tindakan ini jelas dilarang (*manhiyyun 'anhu*), meski tidak menjadikan pelakunya kafir.⁴⁷

Mengutip kitab *Mufradat al-fazl al-Qur'an* karya Raghib al-Isfahani, Syamsudin Arif mengungkapkan, apabila dibaca secara linguistik, permasalahan menjadikan mereka sebagai *auliya'* atau *waliy* mempunyai dua arti, yaitu memberikan dukungan dan pembelaan –jika lafaznya dibaca *walayah* (dengan fathah), dan menyerahkan mandat atau memberi kekuasaan –jika lafaznya dibaca *wilayah* (dengan kasrah). Maka, tindakan *muwalatulkuffar* tidak hanya berarti menjalin kerja sama atau beraliansi, tetapi juga menyerahkan wilayah (kekuasaan/kepemimpinan) umat Islam

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

kepada non-Muslim. Dan tentunya hal ini dilarang jika merujuk pada pendapat diatas.⁴⁸

Dari sini selanjutnya Syamsudin Arif menyimpulkan bahwa syarat keislaman mendahului syarat keadilan dan syarat-syarat yang lain dalam hal memilih ataupun mengangkat seorang pemimpin. Arif menganalogikan sebagaimana dalam pernikahan, syarat keimanan mendahului syarat kecantikan. Allah berfirman dalam al-Qur'an: "*Sesungguhnya seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik [untuk dinikahi] daripada wanita musyrik yang cantikbetapa pun kalian mengaguminya.*"⁴⁹ Adapun syarat keadilan bagi seorang pemimpin yang dimaksud adalah ia mampu menahan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun tindakan-tindakan yang bisa menjatuhkan reputasinya. Sementara menurut al-Baghdadi, dalam konteks politik kenegaraan, syarat adil untuk menjadi pemimpin itu artinya bahwa yang bersangkutan merupakan sosok terpercaya dan dapat diterima kesaksiannya.⁵⁰

b. Ulama': Gelar Ahli Ilmu Agama atau Ilmu Umum?

Sebagaimana polemik pemaknaan lafaz *auliya'* yang membelah masyarakat menjadi dua kubu, pun demikian dalam polemik pemaknaan lafaz ulama' yang disematkan kepada orang yang bukan ahli agama. Ada kubu yang mengamini penafsiran Hidayat Nur Wahid juga terdapat kubu yang menolak. Dalam tulisan ini tidak disebutkan keseluruhan wacana yang muncul, melainkan hanya beberapa yang dianggap telah mewakili perdebatan yang ada.

Dalam salah satu tulisannya, Moh. Romzi mengungkapkan makna ulama' bukanlah seperti penafsiran yang dilakukan oleh Hidayat Nur Wahid.⁵¹ Menurutnya, ulama' merupakan seorang yang ahli dalam hal agama. Untuk menguatkan argumentasinya, lebih jauh ia memaparkan bahwa ulama' mempunyai peran dan fungsi strategis, sebagai berikut. *Pertama* sebagai pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud sebagai pewaris para nabi adalah mereka yang memelihara, menjaga serta meneruskan risalah dakwah mereka, yang dalam konteks ini adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, yang dimaksud ulama' adalah mereka yang ahli dalam ilmu agama Islam.⁵²

Peran ulama' yang kedua menurut Romzi adalah sebagai pembimbing, pembina, dan penjaga umat. Ulama' adalah mereka yang mempunyai tugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus (agama Islam). Ulama' juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir beserta antek-anteknya melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Mustahil hal ini dilakukan, jika yang bersangkutan tak faham seluk-beluk detail tentang Islam. Maka dari pengertian ini, ulama' tentu gelar yang disematkan untuk mereka yang ahli dalam agama Islam.⁵³

Peran yang dimiliki oleh ulama' yang ketiga sebagai pengontrol penguasa. Lebih jauh Romzi memaparkan, peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika para ulama' mampu memahami konstelasi politik global dan juga regional. Mereka

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Lihat Qs. al-Baqarah: 221, Qur'an in word, aplikasi

⁵⁰ Lihat dalam <https://www.dutaislam.com/2016/10/pro-kontra-kajian-tafsir-al-maidah-51.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.06 WIB

⁵¹ Moh. Romzi, "Ulama dalam persepektif Nahdhatul Ulama' dalam Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 2, No. 1, 2012

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

dituntut mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam. Dengan ungkapan lain, seorang ulama' harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Fatwa yang keluar diharapkan mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah sebaliknya.⁵⁴

Dan yang keempat, peran ulama' adalah sebagai sumber ilmu. Ulama' adalah mereka yang ahli dalam masalah halal-haram. Ulama' menjadi tempat rujukan dan menimba ilmu sekaligus bertugas membina umat Islam agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ketiga dan keempat, tentulah mereka yang diberi gelar ulama' selain memiliki pondasi keilmuan Islam yang kuat, mereka juga faham tentang konteks sosial-politik yang terjadi di masyarakat maupun Negara.⁵⁵

Menurut definisi yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ulama' adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam.⁵⁶ Namun jika membaca lintasan sejarahnya, menurut Sumanto al-Qurthubi gelar ulama' bukan ditujukan kepada ahli ilmu agama Islam. Ia berargumen karena pada masa Umayyah maupun Abbasiyah, ahli ilmu agama Islam sudah terdefiniskan dengan istilah-istilah lain seperti misalnya ahli ilmu hadits disebut *muhaditsun*, ahli ilmu kalam disebut *mutakallimun*, pun ahli tafsir disebut *mufasssirin*, ahli fiqh disebut *fugaha*.⁵⁷ Maka gelar ulama' sesungguhnya ditujukan kepada mereka yang ahli dalam hal keilmuan selain Islam.

5. Membaca Realitas Politik di Indonesia

Polemik perebutan simbol makna atas lafaz *auliya'* maupun *ulama'* kian meruncing karena terjadi dekat dengan kontestasi politik di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam meraih kursi kekuasaan, tak jarang politisi berlomba menggunakan ayat-ayat agama. Namun untuk melihat apakah dalam kasus polemik lafaz *auliya'* maupun *ulama'* telah menarik al-Qur'an ke dalam pusaran politik di Indonesia, maka perlu adanya pembacaan terkait realitas politik yang terjadi di sekitar polemik itu berlangsung.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dapat diketahui bahwa diseperti polemik lafaz *auliya'* maupun *ulama'* terdapat kontestasi politik hendak berlangsung yakni Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.

a. Pilkada DKI Jakarta

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017⁵⁸ untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Pemilu ini merupakan kali ketiga yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan bagi DKI Jakarta. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena mengikuti jadwal Pilkada Serentak⁵⁹ gelombang kedua pada 2017.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 10 November 2019

⁵⁷ Sumantho al-Qurthubi, "Narasi Ulama' dalam Sejarah Islam" dalam situs *Islami.co* diposting pada tanggal 17 September 2018; diakses pada tanggal 10 November 2019

⁵⁸ <https://kpujakarta.go.id.>

⁵⁹ *Lihat.* "Wiranto Sebut Tantangan Berat pada Pilkada Serentak 2017 | News | Arah.Com". Diakses

Berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, maka hanya partai politik pemilik 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dari jumlah yang ditentukan, dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Pilkada ini diikuti oleh tiga (3) kandidat pasangan calon, mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai Ahok) sebagai petahana, mencalonkan diri bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Lalu Mantan perwira TNI, Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Rasyid Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno. Selengkapnya bisa lihat tabel berikut.

Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

1) Putaran pertama

NO URUT	PASANGAN CAGUB-CAWAGUB	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD
1	Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	Pengusung: Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN. Pendukung: PKNU, PMB, Partai Buruh, Partai Pelopor, PKDI, Partai Barnas, Pakar Pangan.	28/106
2	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	Pengusung: PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem Pendukung: PKPI, PSI	52/106
3	Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno	Pengusung: Parta Gerindra, PKS Pendukung: Partai Perindo, Partai Idaman	26/106

Sumber: *pilkada2017.kpu.go.id*. Diakses tanggal 2017-04-20.

2) Putaran Kedua

No. Urut	PASANGAN CAGUB-CAWAGUB	PARTAI POLITIK
2	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	Pengusung: PDI-P, Partai Golkar, Hanura, NasDem. Pendukung: PKPI, PSI, PKB, PPP
3	Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno	Pengusung: Partai Gerindra, PKS. Pendukung: Partai Perindo, Idaman, PAN

Sumber: *pilkada2017.kpu.go.id*. Diakses tanggal 20 April 2017.

3) Hasil pemilu

CAGUB - CAWAGUB	PUTARAN 1		PUTARAN 2	
	PEMILIH	%	PEMILIH	%
Agus - Sylvi	937.955	17,06	N/A	
Ahok - Djarot	2.364.577	42,99	2.350.366	42,04
Anies - Sandi	2.197.333	39,95	3.240.987	57,96
Jumlah Suara Sah	5.499.865	100,00	5.591.353	100,00

Sumber: *pilkada2017.kpu.go.id*. Diakses tanggal 20 April 2017.

b. Pilpres 2019

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Secara keseluruhan, Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahudin Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Selengkapnya lihat tabel berikut,

1) Kandidat Capres-Cawapres

NO	PASANGAN CAPRES - CAWAPRES	PARTAI POLITIK	PRESENTASE DAN JUMLAH KURIS DPR
1	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	Pengusung: PDI-P, Partai Golkar, Hanura, NasDem, PKPI, PKB, PPP Pendukung: PBB, PSI, Partai Perindo	63,62/60,3 338 / 560
2	Prabowo Subianto dan Sandiaga Shalahudin Uno	Pengusung: Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat Pendukung: Partai Berkarya, Partai Idaman	36,38/39,7 560

2) Hasil Resmi

Hasil resmi ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari (02.00 WIB)

CALON	PASANGAN	SUARA	%
Joko Widodo	Ma'ruf Amin	85.607.362	55,50
Prabowo Subianto	Sandiaga Uno	68.650.239	44,50
Total		154.257.601	100%

Suara sah	154.257.601	97,62
Suara tidak sah	3.754.905	2,38
Pemilih pengguna hak pilih	158.012.506	81,97
Pemilih golput	32.757.823	18,03
Pemilih terdaftar	190.770.329	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

6. Al-Qur'an dalam Pusaran Politik: Perebutan Simbol Agama

Logika umum yang digunakan dalam kontestasi politik adalah ada pengaruh dukungan partai politik dengan perolehan suara pasangan calon. Argumentasinya, partai politik memiliki struktur politik hingga tingkatan administrasi pemerintahan paling rendah (desa bahkan dusun). Karena itu, mereka meyakini partai politik menjadi pilar utama kemenangan pasangan calon. Semakin banyak partai pendukung, semakin besar potensi kemenangan. Namun nampaknya argumentasi ini tidak selalu dapat dijadikan sebagai ukuran, misalnya dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Secara sosiologis-Geografis, kedua peristiwa yang terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia, baik pilkada maupun pilpres ini memiliki tiga kemiripan. *Pertama*, semua pasangan calon ingin mendapatkan suara pemilih dari kalangan muslim, ini dibuktikan dengan pidato Ahok yang menyinggung surat al-Maidah ayat 51 juga dengan adanya beberapa aksi bela Islam yang mengarah kepada dukungan calon dalam pilkada DKI Jakarta sedangkan dalam pilpres, dibuktikan dengan adanya klaim ulama' dari masing-masing pasangan calon yang diusung. *Kedua*, terdapat pasangan calon yang berstatus sebagai *incumbent* (petahana). Bedanya kemenangan diraih oleh *incumbent* pilpres namun tidak pada pasangan *incumbent* pilkada DKI. *Ketiga*, terjadinya pembelahan yang cukup signifikan di kalangan masyarakat hingga menjadi dua kubu yang saling berseteru bahkan sampai saat ini.

Apabila dianalisis dengan menggunakan teori simbolik interaksionis, maka nampak penggunaan simbol agama sangat dominan dilakukan oleh semua pasangan calon, terutama dalam kontestasi pilpres 2019. KH Ma'ruf Amin dipilih karena diharapkan mampu memperbaiki atau bahkan menghapus stigma yang melekat pada Jokowi Widodo sebagai pihak yang kurang diterima oleh umat Islam. KH Ma'ruf jelas merupakan tokoh yang memiliki legitimasi keislaman berlapis-lapis. Ia memiliki otoritas di bidang ilmu-ilmu keislaman karena ia merupakan seorang yang faham syariat Islam juga pimpinan sebuah pondok pesantren. Legitimasi berikutnya, ia merupakan ujung tombak MUI dan tokoh penting dalam organisasi terbesar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama'. Maka, legitimasi yang berlapis-lapis ini kemudian dikapitalisasi, dan mampu mematahkan tagar #2019GantiPresiden.

Hal ini coba diimbangi oleh pendukung pasangan kompetitor dengan memberikan gelar 'ulama' kepada Sandiaga Uno serta dukungan dari beberapa Ulama' yang memelopori aksi bela Islam pada kasus Ahok. Namun perebutan makna ulama' nampaknya berhasil dimenangkan oleh pasangan Joko-Widodo dan Ma'ruf Amin karena makna ulama' terlalu melekat di kalangan masyarakat Indonesia sebagai gelar orang yang ahli ilmu agama Islam. Sebagai indikar, pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan pemilu. Ulama identik sebagai "Kyai", sebuah gelar religius tertinggi

yang mewakili lafaz ulama' di masyarakat Muslim Indonesia khususnya Jawa. Dan ini merupakan simbol agama yang paling efektif digunakan sebagai media sosialisasi politik.

B. PENUTUP

Dalam memahami lafaz-lafaz al-Qur'an yang dilontarkan oleh para politisi Indonesia menuai beragam polemik tanggapan. Sebagian membahasnya dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam ilmu tafsir. Sebagian yang lain cenderung melakukan beberapa langkah saja, dengan mengutip pendapat-pendapat mufassir terdahulu. Diantaranya ada yang mendukung, namun tak jarang menyerang dengan sikap nyinyir. Terjadilah polemik perdebatan dalam memperebutkan simbol makna agama.

Dari perdebatan dan perebutan simbol agama yang terjadi telah jauh menarik ayat al-al-Qur'an sebagai bentuk legitimasi agama Islam, masuk ke dalam pusaran politik di Indonesia. Ada pihak yang pada akhirnya memenangkan kontestasi politik dengan penggunaan simbol agama tersebut. Berdasar penjelasan ini bisa digarisbawahi bahwa penafsiran atau perebutan simbol makna yang beredar dengan merespon pernyataan dari politisi yang memulai, cukup memberikan warna bagi perkembangan tafsir kontemporer, dan menjadi rujukan bagi masing-masing pembacanya. Namun sikap yang paling baik terhadap berbagai macam tafsir yang beredar ini adalah dengan membacanya secara kritis, serta membandingkannya dengan memilih pendapat yang dipandang paling banyak mengandung masalah bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syamsudin, “Non-Muslim di Pentas Politik” dalam Koran Republika (Kamis, 17/03/2016); juga diposting dalam *nahimunkar.org* diakses pada tanggal 10 November 2019
- Arifin, Samsul, “Ulama Dalam Pusaran Politik Kekuasaan” dalam <https://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 12 Desember 2019
- Federspiel, Howard M., “An Introduction to Qur’anic Commentaries in Contemporary Southeast Asia”, dalam *The Muslim World*, Vol. LXXXI, No. 2, 1991
- Gusmian, Islah, “Dialektika Tafsir al-Qur’an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru”, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005
- Hayy, Abd Al-Farmawy al-, *Metode Tafsir Maudhu’i*, terj. Suryan Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- John, Anthony H., “The Qur’an in the Malay World: Reflection on ‘Abd al-Ra’uf of Singkel (1615-1693)” dalam *Journal of Islamic Studies*, 1998
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012
- Nambo, Abdulkadir B. dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik; Suatu Telaah dari Sistem Politik”, dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 21, No. 2, 2005
- Qurthubi, Sumantho al-, “Narasi Ulama’ dalam Sejarah Islam” dalam situs *Islami.co* diposting pada tanggal 17 September 2018; diakses pada tanggal 10 November 2019
- Riddell, Peter G., *Islam and The Malay-Indonesian World: Transmission and Responses*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, bab IX dan XII;
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Romzi, Moh., “Ulama dalam perspektif Nahdhatul Ulama’ dalam *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 1, 2012
- Sanaky, Hujair AH, “Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin” dalam *jurnal Al-Mawarid*, edisi XVIII, 2008
- Zakaria, Helmy, “Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surat al-Ma’idah Ayat 51” dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 2, no. 2, 2017
- <https://tirto.id/saksi-ahli-agama-kata-awliya-di-al-maidah-51-multi-tafsir-cleP> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.40 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180416105717-32-291058/respons-soal-partai-setan-mui-luruskan-maksud-ayat-alquran> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.50 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1127615/sebut-sandiaga-ulama-hidayat-nur-wahid-beberkan-alasannya/full&view=ok> diakses pada 16 Januari 2019 jam 11.00 WIB

<http://www.nu.or.id/post/read/89265/partai-allah-dalam-tafsir-al-quran> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 jam 08.00 WIB

<https://www.dutaislam.com/2016/10/pro-kontra-kajian-tafsir-al-maidah-51.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.06 WIB

<https://kpujakarta.go.id/>

<https://ahok.org/>

Qur'an in Word. Aplikasi